

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan tentang otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dikukuhkan dengan Undang-undang (UU) telah membawa *konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut disahkan oleh Pemerintah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. Kebijakan tersebut bisa dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah tantangan, yang kedua adalah peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Hal tersebut dikarenakan, dalam UU tersebut diamanatkan suatu kewenangan otonomi yaitu agar daerah melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*public service*).

Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol

penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antardaerah, serta mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber - sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 35 Pendapatan Daerah Adalah Semua Hak Daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Seluruh pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD. Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Darise (2009: 48), Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus dipetingkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang di perlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Untuk mensukseskan anggaran pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang bersumber dari APBN. Salah

satunya adalah dana alokasi umum (DAU) yang dapat digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana alokasi umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*Fiscal Gap*) suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*Fiscal Need*) dengan potensi daerah (Darise, 2009;44). Salah satu yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat adalah pengalokasian belanja daerah (Renyowijoyo (2008: 224)). Anggaran belanja modal didasarkan pada pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dengan demikian pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program – program pelayanan publik.

Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan memengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut Kuncoro (2004). Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sumber – sumber PAD terdiri dari

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.

Pada era otonomi daerah sekarang ini daerah dituntut untuk lebih mandiri, baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mendanai keuangan daerahnya. Setiap daerah harus mampu mengelolah

dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menjunjung keberhasilan otonomi daerah, diantaranya: sumber daya manusia (SDM), pengelolaan sumber daya alam, kemampuan mengelolah keuangan daerah, kondisi social budaya masyarakat, dan kemampuan manajemen (Halim, 2004).Keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah ini tentu tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun unsur-unsur dalam Pendapatan Daerah adalah PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu (Sulistyorini, 2004).

Tabel 1 : Rekapitulasi Kontribusi PAD, DAU dan Belanja Modal Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2009-2013

TAHUN	PAD (Rp)	DAU (Rp)	BELANJAMODAL (Rp)
2009	53.497.002.862.00	261.090.002.000	111.013.078.790
2010	62.314.822.435.00	264.392.757.000	85.908.709.725
2011	74.646.796.347.09	296.472.833.000	117.149.692.686
2012	84.349.037.036.53	336.463.719.000	64.055.590.173
2013	97.092.318.656.59	419.154.808.000	76.371.017.459

Sumber :DPPKADKota Gorontalo

Dari tabel rekapitulasi anggaran di atas, menunjukkan bahwa Jumlah PAD Kota Gorontalo yang direalisasikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2009 jumlah PAD yang diterima oleh Pemerintah Kota Gorontalo sebesar Rp. 53,497 milyar, dengan presentasi kontribusi sebesar 12,80%. Mengalami peningkatan pada 2 (dua) tahun berikutnya, 2010 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 62.314 milyar, 74.646 milyar, dengan presentasi kontribusi sebesar 12,37% dan 13,01%. Kemudian pada tahun 2012 dan 2013 realisasi PAD juga mengalami peningkatan yang sama sebesar Rp. 84.349 milyar, dan Rp. 97.092 milyar, dengan presentasi kontribusi yang juga meningkat sebesar 14,33% dan 14,37%.

Untuk penerimaan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2009 jumlah DAU yang diterima Pemerintah Kota Gorontalo sebesar Rp. 261,09 milyar dengan nilai presentasi kontribusi sebesar 62,51%. DAU juga mengalami peningkatan Pada Tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp. 264,39 milyar dan Rp.296,47 milyar, masing mempunyai nilai presentasi sebesar 52,50% dan 51,68%. Kemudian pada tahun 2012 dan 2011 kembali meningkat menjadi Rp. 336,46 dan 419,15

milyar, dengan presentasi kontribusi yang juga meningkat sebesar 57,18% dan 62,06%.

Sementara itu untuk belanja modal yang direalisasikan mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Pada Tahun 2009 jumlah belanja modal sebesar Rp. 111,01 milyar. Kemudian pada tahun 2010 jumlah belanja modal mengalami penurunan menjadi Rp. 85,02 milyar. Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi belanja bangunan dan gedung yang pada tahun 2009 sebesar 32,86 milyar menjadi Rp. 5,11 milyar. Selanjutnya pada tahun 2011 jumlah belanja modal yang direalisasikan meningkat sebesar Rp 117.14 milyar. Namun pada tahun 2012 belanja modal mengalami penurunan tajam mencapai Rp. 64,05 milyar. Dan pada 2013 belanja modal kembali meningkat menjadi Rp. 76,37 milyar.

Berdasarkan tabel 1 dan penjelasan dapat disimpulkan bahwa jumlah pendapatan dalam APBD Kota Gorontalo terutama untuk membiayai pembangunan lebih di dominasi oleh penerimaan dari transfer pemerintah pusat. Dalam konteks otonomi daerah semestinya kemampuan untuk menyelenggarakan otonomi tersebut ditujukan dengan kontribusi PAD yang tinggi. Namun APBD menunjukkan bahwa dalam membiayai belanja daerah, sebagian besar dana yang digunakan pemerintah daerah masih berasal dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah menghadapi dilema, disatu sisi mereka harus meningkatkan terus jumlah pendapatan asli daerahnya untuk mengimbangi semakin meningkatnya kebutuhan biaya

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, di sisi lain potensi di daerah yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan relatif kecil. Hampir sebagian besar daerah kabupaten dan kota diseluruh Indonesia masih sangat tergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat Halim dan Damayanti (2007:197).

Tabel 2 : Rekapitulasi Presentasi PAD terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun	Pajak Daerah	%	Hasil retribusi daerah	%	Pengelolaan yg dipisahkan	%	Lain-lain PAD yg sah	%
2009	9.327.067.162	8.40	28.602.216.399	25.76	1.730.003.252	1.55	13.837.735.776	12.46
2010	11.219.776.982	10,11	6.692.741.966	7.79	1.257.577.542	1.46	43.144.725.945	50.22
2011	17.931.672.392	15.30	7.070.722.069	6.35	2.030.887.179	1.73	47.613.514.770	40.64
2012	24.181.643.393	37.75	8.210.205.945	12.8	1.825.008.026	2.84	50.132.179.672	78.26
2013	29.938.834.185	39.20	10.043.407.788	13.15	3.081.306.902	4.37	54.028.769.781	70,74

Dapat dilihat dari tabel di atas presentasi PAD terhadap belanja modal di Kota Gorontalo masih relative rendah. Terlihat adanya fluktuasi kenaikan dan penurunan persentase PAD terhadap belanja modal selama periode 2009-2013. Prestasi tertinggi dari tahun 2009-2013 dalam pencapaian target PAD berasal dari sektor pajak daerah yaitu pada tahun 2013 dimana pajak daerah yaitu sebesar Rp. 29.938.834.185 dengan presentase tertinggi sebesar 39.20%. sementara itu sektor pajak daerah terendah pada tahun 2009 merupakan yang terendah dimana hanya sebesar 9.327.067.162 dengan tingkat presentase terendah yaitu hanya 8.40%. tahun 2010 PAD yang bersal dari sektor pajak daerah yaitu

sebesar 11.219.776.982 presentase sebesar 10,11%. Kemudian pada tahun 2011 dan 2012 besarnya sektor pajak daerah mengalami peningkatan yaitu sebesar 17.931.672.392 dan 24.181.643.393 dengan tingkat presentase sebesar 15.30% dan 37.75%.

Prestasi tertinggi dari tahun 2009-2013 dalam pencapaian target PAD berasal dari Hasil retribusi daerah terjadi adanya fluktuasi kenaikan dan penurunan dimana hasil retribusi daerah presentase tertinggi hanya pada tahun 2009 dengan presentase sebesar 25.76% dengan hasil retribusi sebesar 28.602.216.399. dan 2010 merupakan hasil retribusi terendah hanya sebesar 6.692.741.966 dengan presentase 7.79%. sementara itu pada tahun 2011 dan 2012 hasil retribusi daerah yaitu sebesar 7.070.722.069 dan 8.210.205.945. untuk tahun 2013 hasil retribusi daerah yaitu sebesar 10.043.407.788 dengan tingkat presentase 13.15%.

Prestasi tertinggi dari tahun 2009-2013 dalam pencapaian target PAD berasal dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan dimana Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan presentase tertinggi hanya pada tahun 2013 dengan presentase sebesar 4.34% dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3.081.306.902. tahun 2009 dan 2010 hanya sebesar 1.730.003.252 dan 1.257.577.542 dengan presentase 1.55% dan 1.46%. sementara itu pada tahun 2011 dan 2012 yaitu sebesar 2.030.887.179 dan 1.825.008.026 dengan tingkat presentase 1.73% dan 2.84%.

Prestasi tertinggi dari tahun 2009-2013 dalam pencapaian target PAD berasal dari Lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan dari tahun ketahun dimana pada tahun 2009 sebesar 13.837.735.776 presentase sebesar 12.46%. dan pada tahun 2010 dan 2011 yaitu sebesar 43.144.725.945 dan 47.613.514.770 dengan masing-masing presentase sebesar 50.22% dan 40.64%. untuk tahun 2012 dan 2013 Lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan yaitu sebesar 50.132.179.672 dan 54.028.769.781 masing-masing tingkat presentase 78.26% dan 70.74%.

Dari data diatas, terlihat adanya peningkatan penerimaan dari sektor pajak daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan untuk Hasil Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan presentase. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap jumlah PAD dan Pendapatan Daerah Kota Gorontalo secara keseluruhan. Namun permasalahannya adalah seberapa besar PAD beserta komponen didalamnya (seperti: PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah) dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Karena PAD merupakan sumber keuangan terbesar bagi daerah, maka pemerintah harus mampu mengembangkan dan meningkatkan sumber- sumber penerimaan PAD tersebut.

Sementara itu Jumlah PAD yang diterima oleh pemerintah Kota Gorontalo tidak terlalu besar untuk dapat memberikan kontribusi yang

berarti bagi pendapatan daerah secara keseluruhan. Jika dilihat dari persentasi kontribusi, PAD belum terlalu besar memberikan iuran/sumbangan yang berarti bagi pendapatan daerah Kota Gorontalo. Kenyataan ini berarti berbeda dengan teori yang ada, yang menyatakan bahwa PAD merupakan sumber keuangan terbesar bagi Pendapatan Daerah. Hal ini merupakan persoalan bagi pemerintah Kota Gorontalo. Pemerintah harus dapat memecahkan persoalan ini dengan cara terus berupaya keras dalam mengembangkan berbagai potensi PAD yang ada di Kota Gorontalo (misalnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah) sehingga mampu memberikan kontribusi yang makin besar terhadap Pendapatan Daerah. Tujuannya adalah agar Kota Gorontalo menjadi daerah yang lebih maju dan mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Sementara itu Kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah di Kota Gorontalo mengalami adanya fluktuasi kenaikan dan penurunan persentase kontribusi DAU terhadap pendapatan daerah selama periode 2009-2013. Pada tahun 2009 tingkat kontribusi yang diberikan adalah sebesar 62,51%, sementara tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 52,50%. Kemudian pada tahun 2011 besarnya tingkat kontribusi yang diberikan oleh DAU terhadap pendapatan daerah mengalami lagi penurunan menjadi 51,68%. Sementara tahun 2012 tingkat kontribusi DAU terhadap pendapatan daerah terjadi peningkatan kontribusi menjadi 57,18%. Dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu menjadi 62,06%.

Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi, 2007). Namun seperti yang terlihat pada tabel 1, peningkatan PAD tidak diimbangi dengan belanja modal yang justru mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Bahkan pada tahun 2012 realisasi belanja modal justru lebih rendah dibanding tahun yang sebelumnya. Sementara Alokasi belanja modal belum memadai karena beberapa sarana dan prasarana belum lengkap dan harus dibenahi untuk memajukan perekonomian Kota Gorontalo. Semakin meningkatnya belanja modal akan meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan daerah (termasuk parawisata), hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang ditemukan oleh Danial (2015) bahwa belanja modal memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Ardhani (2010) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Populasi dalam penelitian adalah seluruh Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Data yang digunakan berupa laporan APBD tahun 2007-2009. Hasil penelitian menunjukkan secara persial PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal, sedangkan pertumbuhan

ekonomi dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Secara simultan pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu penelitian sekarang meneliti tentang pengaruh PAD, DAU, terhadap Alokasi Belanja Modal. Sampel penelitian pada Kota Gorontalo dengan menggunakan data berupa laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan data runtut waktu selama 5 tahun yaitu 2009-2013, yang kemudian dibagi menjadi 20 periode (kuartalan) yakni dari tahun 2009-2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Panggabean (2009) meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir. Populasi penelitian ini adalah APBD pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan menggunakan data runtun waktu selama 8 tahun yaitu tahun 2000-2007. Hasil penelitian membuktikan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah secara parsial maupun secara simultan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu penelitian sekarang meneliti tentang pengaruh PAD, DAU, terhadap Alokasi Belanja Modal. Sampel penelitian pada Kota Gorontalo dengan menggunakan data berupa laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan data

runtut waktu selama 5 tahun yaitu 2009-2013, yang kemudian dibagi menjadi 20 periode (kuartalan) yakni dari tahun 2009-2013.

Situngkir (2009) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli daerah, danaAlokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemkot/Pemkab Sumatera Utara. Populasi dalam penelitian sebanyak 33 Kabupaten dan Kota. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2004-2007 dengan jumlah sampel sebanyak 19 kabupaten dan kota. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi/PDRB, pendapatan asli daerah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang diporsikan oleh PDRB harga berlaku tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu penelitian sekarang meneliti tentang pengaruh PAD, DAU, terhadap Alokasi Belanja Modal. Sampel penelitian pada Kota Gorontalo dengan menggunakan data berupa laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan data runtut waktu selama 5 tahun yaitu 2009-2013, yang kemudian dibagi menjadi 20 periode (kuartalan) yakni dari tahun 2009-2013.

Nugraeni (2011) meneliti tentang analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah studi pada pemerintah Daerah (Kabupaten)/Kota di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 491

kabupaten/Kota di Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan yang memenuhi kriteria sebanyak 295. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan dan Realisasi APBD selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2008 dan 2009. Hasil penelitian membuktikan bahwa DAU, DAK, dan PAD merupakan faktor yang signifikan untuk prediksi anggaran belanja daerah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu penelitian sekarang meneliti tentang pengaruh PAD, DAU, terhadap Alokasi Belanja Modal. Sampel penelitian pada Kota Gorontalo dengan menggunakan data berupa laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan data runtut waktu selama 5 tahun yaitu 2009-2013, yang kemudian dibagi menjadi 20 periode (kuartalan) yakni dari tahun 2009-2013.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh PAD, DAU terhadap alokasi belanja modal dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Gorontalo. Penelitian ini berjudul “**Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Bagi Penerimaan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal**” (Studi pada Pemerintah Kota Gorontalo)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pada PAD tidak diimbangi dengan belanja modal yang justru mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun 2012 realisasi belanja modal Pemerintah Kota Gorontalo justru lebih rendah dibanding tahun-tahun yang sebelumnya.
- b. Masih kurangnya alokasi belanja modal dibuktikan dari sarana dan prasarana yang belum memadai terkait transportasi dan pengembangan pariwisata.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat Analisis kontribusi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap Penerimaan Daerah pada pemerintah Kota Gorontalo?
2. Apakah kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) bagi penerimaan daerah berpengaruh terhadap belanjamodal pada Pemerintah Kota Gorontalo?
3. Apakah kontribusidana alokasi umum (DAU) bagi penerimaan daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota Gorontalo?

4. Apakah kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) bagi penerimaan daerah dan dana alokasi umum (DAU) bagi penerimaan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat analisis kontribusi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap penerimaan daerah pada pemerintah Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) bagi penerimaan daerah terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi dana alokasi umum (DAU) bagi penerimaan daerah terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota Gorontalo.
4. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) bagi penerimaan daerah dan Dana alokasi umum (DAU) bagi penerimaan daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Manfaat dari teoritis dari penelitian ini diharapkan Sebagai upaya pengembangan dan pengetahuan dibidang akuntansi khususnya akuntansi sector publik dalam kaitannya dengan anggaran pendapatan belanja daerah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada pemerintah Kota Gorontalo, terkait dengan kebijakan pendapatan asli daerah dan alokasi umum serta belaja modal.